

Muhammad Safaat Gunawan, S.H., M.H.
Eki Furqon, S.H., M.H.



NEGARA DAN HAK ATAS PANGAN

UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN
PANGAN DI INDONESIA

NEGARA DAN HAK ATAS PANGAN: UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN PANGAN DI INDONESIA

Muhammad Safaat Gunawan, S.H., M.H.

Eki Furqon, S.H., M.H.



Penerbit KBM Indonesia

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku

**NEGARA DAN HAK ATAS PANGAN:
UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN PANGAN DI INDONESIA**

Copyright @2025 by Muhammad Safaat Gunawan, S.H., M.H., dkk

All rights reserved

KARYA BAKTI MAKMUR (KBM) INDONESIA

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

NO. IKAPI 279/JTI/2021

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

081357517526 (Tlpn/WA)

Penulis

Muhammad Safaat Gunawan, S.H., M.H.

Eki Furqon, S.H., M.H.

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruahey, Drs., M.Sc

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Ara Caraka

21 x 29,7 cm, iv + 69 halaman

Cetakan ke-1, November 2025

ISBN 978-634-202-945-9

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di

DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

Tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- (i) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (ii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (iii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (iv) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku berjudul “Negara dan Hak atas Pangan: Upaya Mewujudkan Keadilan Pangan di Indonesia”. Buku ini lahir dari keprihatinan sekaligus komitmen untuk memahami peran dan tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas pangan sebagai salah satu hak asasi manusia yang fundamental.

Pangan tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai hak dasar yang menentukan keberlangsungan hidup, kesehatan, dan martabat manusia. Dalam konteks Indonesia, pemenuhan hak atas pangan memiliki dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan ekologis yang saling berkaitan. Oleh sebab itu, negara memikul tanggung jawab moral, politik, dan konstitusional untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, dan keberlanjutan pangan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan turunannya, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Buku ini membahas secara komperhensif bagaimana negara melalui kebijakan, regulasi, dan kelembagaan berupaya mewujudkan keadilan pangan bagi seluruh warga negara. Analisis diarahkan pada keterkaitan antara norma konstitusional dan implementasinya dalam kebijakan publik, mulai dari pengaturan mengenai ketahanan pangan, keamanan pangan, hingga pembentukan kelembagaan yang berperan dalam mengelola cadangan pangan nasional. Beberapa regulasi penting yang menjadi rujukan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah.

Melalui pembahasan tersebut, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi pengembangan kebijakan pangan di Indonesia, sekaligus menjadi referensi bagi akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang memiliki kepedulian terhadap isu kedaulatan dan keadilan pangan nasional.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak terlepas dari keterbatasan data, dinamika kebijakan yang terus berkembang, serta kompleksitas tata kelola pangan di berbagai tingkatan pemerintahan. Namun demikian, karya ini diharapkan dapat menjadi sumbangan kecil dalam upaya besar bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita

konstitusional: menjamin setiap warga negara hidup sejahtera, berkeadilan sosial, dan berdaulat atas pangannya sendiri.

Akhirnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk data, masukan imiah, maupun dorongan moral selama proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi penguatan sistem pangan nasional yang adil, berkelanjutan, dan berdaulat.

Serang, 13 Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 01 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Dan Manfaat Penulisan Buku	9
C. Landasan Hukum Dan Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pangan.....	10
BAB 02 DASAR PEMIKIRAN DAN KONSEP HAK ATAS PANGAN.....	17
A. Teori Negara Kesejahteraan Dan Tanggung Jawab Konstitusional	17
B. Teori Keadilan Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia	20
C. Konsep Hak Atas Pangan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara.....	23
D. Konsep Kedaulatan Dan Keadilan Pangan	25
BAB 03 KERANGKA HUKUM PENYELENGGARAAN PANGAN	29
A. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	29
B. Perubahan Regulasi Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja	31
C. Peraturan Pelaksana.....	34
BAB 04 IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PANGAN DI INDONESIA	45
A. Kondisi Umum Ketahanan Pangan Dan Kedaulatan Pangan Nasional.....	45
D. Kebijakan Dan Program Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Atas Pangan.....	47
E. Evaluasi Implementasi Dan Tantangan Keadilan Pangan.....	49
BAB 05 PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	63
PROFIL PENULIS	69

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adam, Lukman, dan Achmad Suryana. *Pengembangan Sistem Pangan Melalui Penguatan Badan Pangan Nasional*. Jakarta: Kajian, 2023.
- Afidah, Shofiyatul, dkk. *Daya Tampung Beban Pencemaran Sebagai Dasar Pengelolaan Lingkungan Sungai Ciujung, Provinsi Banten*. 2021.
- Al Arifa, Nur Saudah, dan M Hidayatul Mustofa. *Lima pilar kedaulatan pangan Nusantara*. Ugm Press, 2018.
- Andini, Ayunda Puti, dkk. *Strategi Pengelolaan Kualitas Air Sungai Ciujung Berdasarkan Daya Tampung Beban Pencemaran dengan Metode Qual2kw*. Sekolah Pascasarjana, 2017.
- Ariani, SE. "distribusi pendapatan." *Pengantar ilmu ekonomi*, CV. Intelektual Manifes Media, 2023, 59.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jilid II. Jakarta: MK RI, 2006.
- Bhakti, Indira Swasti Gama. *Pengantar Hukum Indonesia: Teori, Praktik, dan Transformasi*. 2025.
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. *Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2020.
- Badan Pangan Nasional (Bapanas). *Laporan Tahunan Badan Pangan Nasional Tahun 2023*. Jakarta: Bapanas, 2024.
- . *Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2024*. Jakarta: Bapanas, 2023.
- . *Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2024*. Jakarta: Bapanas, 2023.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. *Provinsi Banten dalam Angka 2023*. Serang: BPS, 2023.
- . *Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Provinsi Banten 2023 (Hasil Susenas Maret 2023)*. Serang: BPS Provinsi Banten, 2024.
- Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Prenada Media, 2023.
- Fairbairn, Madeleine. *Framing resistance: International food regimes and the roots of food sovereignty*. 2008.
- Hadinatha, Miftah Faried. *Pemerintah Pusat dan Daerah: Pengadopsian Negara Kesatuan dengan Sistem Desentralisasi yang Desentralistik*. Prenada Media, 2025.
- Hamidah Retno Wardani, Ns., dkk. *Kebutuhan Dasar Manusia*. Rizmedia Pustaka Indonesia, 2023.
- Haris, Syamsuddin. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Heri Napitupulu. *Sekuritisasi Pangan di Indonesia*. Tohar Media, 2024.

- Ikrar, Taruna. *Harmoni Keamanan & Inovasi: Visi Strategis BPOM Menuju Indonesia Emas 2045*. PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2025.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Ir Gatot MS, DAA. *Lahan dan kedaulatan pangan*. Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Ismoyo, Jarot Digdo, dkk. *Teori Negara Hukum Modern*. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. London: Routledge, 2017.
- Kent, George. *Freedom from Want: The Human Right to Adequate Food*. Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2005.
- McMichael, Philip. *Rezim Pangan dan Masalah Agraria*. INSISTPress, 2020.
- Mudaris, Mochammad Rizaldi. *Kewenangan dinas ketahanan pangan dalam mewujudkan pangan lokal sesuai potensi dan kearifan lokal sebagai pemenuhan konsumsi pangan di provinsi banten berdasarkan peraturan daerah provinsi banten nomor 2 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pangan*. Universitas sultan ageng tirtayasa, 2023.
- Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- . *Negara Kesatuan dalam Wacana Teoritis*. Bandung: Nusamedia, 2021.
- Nurhayati, Nurhayati, dkk. *Ekonomi Kerakyatan: Membangun Kemandirian Nasional*. Yogyakarta: PT Star Digital Publishing, 2025.
- Novita, Asti Amelia, dkk. *Governance for Sustainable Development*. Jakarta: Selaras Media Kreasindo, 2025.
- Pareke, JT, dan MH Sh. *Penataan ruang kawasan perdesaan berbasis perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia (melalui pendekatan trinity protection of sustainability concept)*. Zifatama Jawa, 2020.
- Philipus, M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Ruhiyat, Sandy Gustiawan, dkk. *Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca UU Cipta Kerja*. Deepublish, 2022.
- Safa'at, Rachmat. *Rekonstruksi politik hukum pangan: dari ketahanan pangan ke kedaulatan pangan*. Universitas Brawijaya Press, 2013.
- Soedarto, Teguh, dan Rojaunnajah Kartika Ainiyah. *Teknologi Pertanian Menjadi Petani Inovatif 5.0: Transisi Menuju Pertanian Modern*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.
- Syamsuddin Haris. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

- Waldo, Dwight. *The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration*. London: Routledge, 2017.
- Widowati, Sri, dan Rizki Amalia Nurfitriani. *Diversifikasi pangan lokal untuk ketahanan pangan: perspektif ekonomi, sosial, dan budaya*. Penerbit BRIN, 2023.
- Yunus, Mukhlis, Said Mulyadi, dan Cut Huzaimah. *Efisien Pemasaran dan Ketahanan Pangan*. Syiah Kuala University Press, 2022.

Jurnal:

- Adam, Lukman, dan Achmad Suryana. "Pengembangan sistem pangan melalui penguatan badan pangan nasional." *Kajian* 26, no. 1 (2023): 1–20.
- Ahmad Saifulloh, Putra Perdana. "Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara dalam Amandemen Kelima UUD 1945." *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 227.
- Azhar, Mesy Azmiza. "Dinamika Urusan Konkuren Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Sistem Desentralisasi." *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 648–60.
- Budiman, Lalu, dan Dedi Suhendi. "Resiliensi penguatan ketahanan pangan daerah di Indonesia." *Jurnal Perlindungan Masyarakat: Bestuur Praesidium* 1, no. 2 (2024): 63–71.
- Byaruhanga, Ronald, dan Ellinor Isgren. "Rethinking the alternatives: food sovereignty as a prerequisite for sustainable food security." *Food ethics* 8, no. 2 (2023): 16.
- Caldwell, Peter C. *Democracy, capitalism, and the welfare state: debating social order in postwar West Germany, 1949–1989*. Oxford University Press, 2019.
- Calloway, Eric E., dkk. "New Measures to Assess the 'Other' Three Pillars of Food Security Availability, Utilization, and Stability." *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity* 20, no. 1 (2023): 51.
- Constantine, Jennifer, dan Mariana Santarelli. *Brazil's Policies to Guarantee Food Rights*. The Institute of Development Studies and Partner Organisations, 2017.
- Dewi Mulyawati, S. "Scoping Review: Manfaat Penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dalam Meningkatkan Keamanan dan Mutu Produk Makanan." *Journal Occupational Health Hygiene and Safety* 2, no. 2 (2024): 250–64.
- Fauzi, Nurmiifah, dan Titi Stiawati. "Inovasi Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam Peningkatan Ketahanan Pangan." *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 15, no. 1 (2024): 52–70.
- Golay, Christophe, dan Adriana Bessa. *The Right to Seeds in Europe*. Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, 2018.
- Hadiprayitno, Irene I. "Food Security and Human Rights in Indonesia." *Development in Practice* 20, no. 1 (2010): 122–30.
- Hertel, Shareen. "Hungry for Justice: Social Mobilization on the Right to Food in India." *Development and Change* 46, no. 1 (2015): 72–94.

- Hosein, Zainal Arifin. "Peran Negara dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menurut UUD 1945." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 3 (2016): 503–28.
- Jati, Kumara. "An association between food policy and rice food balance sheet." 119 (2024): 02001.
- Luhulima, Yusran Baginda, dkk. "Konsep Pemenuhan Hak Atas Pangan Bagi Masyarakat di Wilayah Perbatasan Pada Masa Pandemi Covid-19." *Pattimura Legal Journal* 2, no. 1 (2023): 1–12.
- Mamoriska, Sonya. "Reposisi BULOG dalam Rencana Pembentukan Badan Pangan Nasional." *Jurnal Pangan* 29, no. 3 (2020): 221–42.
- Martinez, Marian Garcia, dkk. "Co-Regulation as a Possible Model for Food Safety Governance." *Food Policy* 32, no. 3 (2007): 299–314.
- Mawuntu, J. Ronald. "Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum UNSRAT* 20, no. 3 (2012): 11–21.
- McAuliffe, Pádraig. "Theories of State Development at the Dawn of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights." *Journal of the History of International Law / Revue d'histoire du droit international* 1, no. aop (2025): 1–41.
- Minogue, Martin. "Governance-Based Analysis of Regulation." *Annals of Public and Cooperative Economics* 73, no. 4 (2002): 649–66.
- Nyikahadzoi, Kefasi, dkk. "Creating Food Self-Reliance among the Smallholder Farmers of Eastern Zimbabwe: Exploring the Role of Integrated Agricultural Research for Development." *Food Security* 4, no. 4 (2012): 647–56.
- Rachmat Safa'at. *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan: Dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013.
- Syarifuddin, Ateng. "Selayang Pandang tentang Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II." Dalam *Tiga Puluh Tahun Fakultas Hukum UNPAR*, 1988.
- Saragih, Juli Panglima. "Kelembagaan Urusan Pangan dari Masa ke Masa dan Kebijakan Ketahanan Pangan." *Jurnal Pangan* 26, no. 1 (2017): 57–80.
- Sibuea, Hotma P., dkk. "Paradigma Kedaulatan Pangan sebagai Landasan Penanggulangan Krisis Pangan Global dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan." *Krtha Bhayangkara* 16, no. 2 (2022).
- Simandjuntak, Reynold. "Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 7, no. 1 (2015): 57–67.
- SINAGA, SRI WAHYUNI. "Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antarwilayah di Indonesia." *Circle Archive* 1, no. 7 (2025).
- Sodiq, Edi Mulyadi Zafar, dan Eki Furqon. "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Terhadap Peningkatan

- Ketahanan Pangan di Provinsi Banten." *Gorontalo Law Review* 5, no. 2 (2022): 443–58.
- Usman, Anwar. "The role of Indonesian Constitutional Court in strengthening welfare state and the rule of law." *Lex Publica* 7, no. 1 (2020): 11–27.
- Wijaya, David Doresta, dan Nurul Mubin. "Teori Kedaulatan Negara." *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 114–21.
- Wardhana, Tri Aji Nur Dewa Kusuma, dkk. "Peran Negara dalam Menjamin Hak Bebas dari Kelaparan." *IBLAM Law Review* 2, no. 2 (2022): 98–107.
- Wardhana, Tri Aji Nur Dewa Kusuma. "Peranan Negara dalam Menjamin Hak Bebas dari Kelaparan dalam Perspektif Konvensi Ekosob," 1 (2021): 63–73.
- Zazili, Ahmad, dan Mochammad Bakri. "Construction of Food Law Based on Rights Approach to Realize the Right to Food." *Technium Soc. Sci. J.* 30 (2022): 292.

Internet:

- Antara Banten. "Alih Fungsi Lahan Pertanian di Banten Selama 2018–2019 Capai 3,8 Ribu Hektare." 14 Agustus 2021. Diakses 10 Oktober 2025. <https://banten.antaranews.com/berita/59832/alih-fungsi-lahan-pertanian-di-banten-selama-2018-2019-capai-38-ribu-hektare>.
- BMKG Provinsi Banten. "Analisis Hujan Bulanan Oktober 2024." Diakses melalui <https://bbmkg2.bmkg.go.id/iklim-ahb/analisis-hujan-bulanan-oktober-2024>.
- Badan Pangan Nasional. *Rencana Aksi Badan Pangan Nasional 2024*. Jakarta, 2023.
- Badan Pangan Nasional/NFA. "Luncurkan SiPangan Daerah Versi 2, Dorong Integrasi Data Pangan Nasional." Diakses melalui <https://badanpangan.go.id/blog/post/nfa-luncurkan-sipangan-daerah-versi-2-dorong-integrasi-data-pangan-nasional>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. *Provinsi Banten dalam Angka 2023*. Diakses dari <https://banten.bps.go.id>.
- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. "Dalam Rangka Gerakan Selamatkan Pangan." Diakses 12 September 2025. <https://lppm.untirta.ac.id/2025/09/12/dalam-rangka-gerakan-selamatkan-pangan-dinas-ketahanan-pangan-provinsi-banten-melaksanakan-penandatanganan-perjanjian-kerjasama/>.
- Karantina Pertanian. "Talas Beneng Jadi Komoditas Ekspor Unggulan di Banten." *Radar Banten*, 25 Mei 2023. <https://www.radarbanten.co.id/2023/05/25/talas-beneng-jadi-komoditas-ekspor-unggulan-di-banten-ini-kelebihannya-menurut-karantina-pertanian/>.
- PT Agrobisnis Banten Mandiri. *Profil Perusahaan dan Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah*. Diakses 18 Oktober 2025.

United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*. 1948.

———. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*. 1966.

PROFIL PENULIS



Muhammad Safaat Gunawan, S.H., M.H. lahir di Kotabaru, Kalimantan Selatan, 20 April 1997. Menempuh pendidikan Sarjana Hukum (S1) di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2015-2019) dan melanjutkan pendidikan Magister Hukum (S2) di Universitas Hasanuddin (UNHAS), lulus pada tahun 2023 pada bidang Hukum Tata Negara.

Sejak tahun 2023, aktif sebagai Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Fokus keilmuan dan penelitian pada bidang Hukum Tata

Negara, Ketatanegaraan Indonesia, Pemilu, Otonomi daerah, serta Demokrasi Konstitusional.



Eki Furqon, S.H., M.H. seorang yuris, lahir pada 13 Maret 1985 di Serang, Menempuh Pendidikan (S1) di Universitas Islam Bandung pada 2003 (*lulus tahun 2008*), hingga akhirnya dapat menempuh studi Magister Hukum Tata Negara di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang pada 2012 (*lulus tahun 2015*).

Sebagai seorang akademisi dan pemerhati hukum menaruh perhatian besar terhadap isu otonomi daerah, tata kelola pemerintahan, dan penguatan sistem

ketatanegaraan, aktif menulis serta mengkaji Konstitusi Ketatanegaraan, Otonomi Daerah, Sistem Kepemiluan dan Demokrasi.

Hingga saat ini, ia merupakan Dosen Tetap di Bidang Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia. Ia juga masih aktif menulis menulis Karya Ilmiah lainnya.